



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
**UNIT KERJA** : DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BURHANUDDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **105879**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **620.800.000**

1. Tanah Seluas 509 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 95.800.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1033 m2/1875 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 509 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **84.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **19.500.000**

**D. SURAT BERTAHAPAN**

Rp. **201.000.000**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **89.581.700**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.014.881.700
III. HUTANG	Rp.	23.149.782
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	991.731.918

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.